



PARLEMENTARIA

Anggaran Dana LN Boleh Dialihkan

PONTIANAK—Khawatir pengalihan anggaran perjalanan dinas luar negeri untuk kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Kalbar bakalan menjadi temuan lembaga BPK-RI, sepertinya tak akan terjadi. Itu karena inisiatif pengalihan ternyata tidak bermasalah, asalkan sama-sama bagi kepentingan kegiatan rutin dan mengikat.

“Yang tidak boleh justru misalnya anggaran perjalanan dinas digunakan membangun atau merehab gedung, biaya modal seperti membeli meubeler, komputer, dan lain sebagainya,” jelas Suriansyah, wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, kemarin.

Menurut dia, sebenarnya DPRD Provinsi Kalbar mengalokasikan anggaran perjalanan dinas ke luar negeri di APBD tahun anggaran 2018. Hanya, mengingat berbagai hal, DPRD memutuskan meniadakan perjalanan dinas ke luar negeri tersebut.

Pembatalan perjalanan dinas ke luar negeri di antaranya dikarenakan kekurangan anggaran untuk keperluan-keperluan lain lebih mendesak. Sementara anggaran untuk reses anggota DPRD hanya dialokasikan sebagian dalam APBD murni 2018.

Sebagiannya lagi, sambungnya, akan dialokasikan di APBD Perubahan tahun anggaran 2018. Akan tetapi karena APBD perubahan tidak disahkan, maka sebagian anggaran dana kegiatan reses dipenuhi dengan anggaran untuk perjalanan dinas ke luar negeri.

Anggaran untuk reses tetap harus dipenuhi, karena kegiatan anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat ini bersifat mengikat, seperti belanja rutin lainnya. “Memang harus dianggarkan untuk menunjang kegiatan DPRD Kalbar,” ucapnya. (den)